

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie, Habib, 2017, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Jakarta.

_____, 2011, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris Dan PPAT*, Citra Adiyta, Bandung, hlm.102.

Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Effendhie, Machmoed,_____, *Teori Organisasi*, International Golden Institute, Jakarta.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hartono, C.F.G Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung.

HS, Salim dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

HS, Salim, 2019, *Peraturan Jabatan Dan Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*, Lakbang Pressindo, Yogyakarta

Santoso, Urip, 2015, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

_____, 2016, *Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang,, dan Sifat Akta*, Kencana, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soekarno, 1986, *Serba-Sebi Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Yuliana, Jakarta

Sujanto, 1994, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Sumardjono, Maria SW., 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Thoha, M, 1989, *Pembinaan Organisasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Rancangan Undang-Undang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

B. Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah

C. Jurnal/Makalah/Tesis

Indah Restyaningrum, “Peran Kepala Kantor Badan Pertanahan dalam Rangka
Pengawasan Terkait Cuti Bagi Jabatan PPAT”, Tesis, Program Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada,
Yogyakarta, 2020.

Yolanda Mouw, “Peran Kepala Kantor Pertanahan Kota Makasar Dalam
Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tugas Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT)”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2018.

Muhamad Akil Fariabi dan Widodo Suryandono, Perbandingan Netralitas Organ
Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Dengan Organ Pengawas Notaris
Dalam Menjalankan Fungsinya, Jurnal Hukum, Universitas Indonesia, 2019

Ockhy Loedvian Zulkarnain, Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Bantul, Tesis, Program Studi
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2019